

PERAN *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO) MENANGANI KRISIS KEAMANAN MARITIM DI TANDUK AFRIKA (2008-2016)

Oleh: Adzka Ulil Amri

Email : adzkaulilamri19@gmail.com

Pembimbing : DR.Umi Oktyari Retnaningsih,MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Horn of Africa region is a crucial area in terms of maritime security. Incidents of piracy, rebellion, weapon smuggling by sea, illegal fishing, and other criminal activities have prompted countries around the world to address them. NATO's efforts and successes in addressing security issues in the Horn of Africa are discussed in-depth.

Clive Archer's theory of International organization membership and objectives in international organizations is used to discuss NATO's role. This qualitative research analyzes secondary data from journals, books, official publications, newspapers, and magazines. The research findings show that NATO successfully addressed security in the Horn of Africa through Operation Ocean Shield. This military operation has become a model for other operations carried out by other countries

Keyword(s) : *The Role of NATO, Maritime Security, International Organization Theory*

PENDAHULUAN

Keamanan maritim kawasan Tanduk Afrika telah mengalami perubahan besar terhadap lingkungan keamanannya akibat meningkatnya jumlah militer asing yang dikerahkan di wilayah ini sejak tahun 2001. Berbagai macam aktor keamanan internasional seperti negara-negara dari Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, negara di kawasan Teluk, hingga Asia saat ini beroperasi di kawasan tersebut. Akibatnya, Tanduk Afrika telah mengalami proliferasi pangkalan militer asing dan peningkatan kekuatan angkatan laut.

Proliferasi militer asing di kawasan ini terjadi bukan tanpa sebab melainkan sebagai bentuk aksi dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Terorisme, pembajakan (*piracy*), insurjensi/pemberontak, perompakan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*), penyelundupan melalui laut (*maritime smuggling*) dan tindakan kriminal di laut (*maritime crimes*) lainnya seperti penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan beberapa contoh bentuk

ancaman keamanan maritim.¹ Dua yang disebutkan di awal merupakan masalah utama yang sering kali menjadi fokus utama militer asing di kawasan Tanduk Afrika sehingga *counter-terrorism* dan *counter-piracy* merupakan agenda keamanan wajib di kawasan ini.

Sejak tahun 2008 hingga 2016, fenomena perompakan terhadap kapal-kapal yang lewat di wilayah perairan Tanduk Afrika sering terjadi. Perompakan menyoal kapal-kapal tanker pengangkut bahan kimia, kapal barang, kapal minyak, hingga kapal ro-ro. Tercatat 590 penyerangan yang terjadi dilakukan oleh para pembajak yang berasal dari Somalia di sekitar wilayah Tanduk Afrika mulai dari perbatasan laut merah ke teluk Aden hingga wilayah laut di selatan Somalia. Tanduk Afrika telah menjadi tempat yang sangat strategis sebab ia merupakan gerbang menuju laut merah dan teluk Aden yang menjadi jalur perdagangan secara geografis berdekatan dengan semenanjung Arab yang kaya akan minyak.

¹ Paul Shemella, *Global Responses To Maritime Violence: Cooperation and Collective Action*, (California: Stanford University Press, 2016), hlm. 5

Selain itu, aksi pembajakan juga dilatar belakangi oleh krisis yang terjadi di negara-negara kawasan Tanduk Afrika seperti Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia.

Keamanan transportasi laut untuk perdagangan global merupakan hal yang tidak bisa diremehkan sebab lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan oleh transportasi laut dan lebih dari 90% impor dan ekspor Afrika dilakukan melalui laut.² Oleh karena itu, segala hal yang mengganggu prinsip kebebasan navigasi serta keamanan dan keselamatan personil di atas kapal angkutan dapat membahayakan vitalitas ekonomi diseluruh dunia. Sebelum memasuki dekade 2000an, tindakan dalam mengatasi pembajakan kapal, terorisme, dan tindak kriminal lainnya di kawasan perairan Tanduk Afrika belum terlaksana dalam bentuk aksi langsung seperti *counter terrorism* dan *counter-piracy* yang menggunakan kekuatan militer.³ Majelis Umum PBB baru hanya memutuskan untuk membentuk wadah konsultasi informal terkait laut beserta perangkat hukumnya pada tahun 1999. *Informal Consultative Proses*(ICP) sendiri baru terbentuk di tahun 2001 lewat Resolusi Majelis Umum PBB dengan mengeluarkan dokumen-dokumen yang berisi mengenai penetapan kerangka kerja berupa bagaimana segala kegiatan di laut harus dilakukan secara legal dan konsisten.⁴ Saat itu belum ada pembahasan mengenai konsep keamanan maritim, melainkan hanya pembahasan mengenai proses keselamatan di laut, yang mana proses ini terus berkembang dan diperbincangkan oleh banyak pihak mengikut fenomena yang terjadi seperti fenomena perompakan terorganisir yang juga memiliki hubungan dengan jaringan teroris.

Sejak peristiwa 11 September 2001, komunitas maritim internasional meninjau

kembali hukum tentang keamanan di laut yakni *International Convention of Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang bertujuan untuk melindungi pelabuhan dan kapal di seluruh dunia dari ancaman terorisme. Berdasarkan konvensi tersebut terciptalah *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) serta amandemen SOLAS 74 yang menjadi standar keamanan di industri maritim untuk mencegah tindak kejahatan di laut seperti pembajakan, penyanderaan, penyelundupan, penyalahgunaan fungsi kapal serta merusakkan kargo.⁵

Keamanan Maritim di Tanduk Afrika selama bertahun-tahun telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keselamatan pelayaran di wilayah itu. Tekanan dari dunia internasional kemudian memaksa kekuatan militer asing untuk terlibat di kawasan Tanduk Afrika. Terhitung sejak tahun 2002, empat misi militer internasional berbeda dimana pasukan militer asing terlibat operasi di wilayah ini yaitu Pasukan Maritim Gabungan pimpinan Amerika Serikat (*Combined Maritime Forces*), *Operation Atalanta* (Uni Eropa), *Operation Ocean Shield* (NATO), dan *the EU Training Mission in Somalia*.⁶ *Operation Ocean Shield* merupakan misi *counter-piracy* yang dimandatkan kepada NATO di Tanduk Afrika, khususnya di kawasan Teluk Aden, Samudra Hindia, dan Laut Arab sebagai bagian dari *Operation Enduring Freedom – Horn of Africa* (OEF-HOA), dan beroperasi dari Agustus 2009 hingga Desember 2016.⁷

Peran NATO sangat signifikan di perairan ini karena selain sebagai bentuk tindakan preventif terhadap gangguan serangan perompak juga sekaligus melindungi kapal dan meningkatkan tingkat keamanan sekitar perairan Tanduk Afrika.⁸ Misi tersebut juga memberikan perlindungan kepada kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan

²Eric Pichon and Marian Pietsch, 'Piracy and Armed Robbery off the Coast of Africa: EU and Global Impact', *European Parliamentary Research Service*, March, 2019, 1–23 <<https://doi.org/10.2861/78273>>.

³United Nations, United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea, https://www.un.org/Depts/los/consultative_process.htm, diakses pada 21 Oktober 2021

⁴Laporan General Assembly, diakses dari <https://undocs.org/A/56/121>, 21 Oktober 2021.

⁵IMO 2019 Diakses dari <http://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/Home.aspx> Tanggal 22, Maret, 2019

⁶Neil Melvin, *The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region*, (Stockholm: SIPRI, 2019), hlm. 24

⁷ NATO Allied Maritime Command, 'Operation Ocean Shield', <https://mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield>, diakses pada 21 Oktober. 2021.

⁸Ibid.

ke wilayah tersebut di bawah *Operation Allied Provider*. Selain itu, NATO juga bekerjasama namun terpisah (secara struktur komando) dengan *The European Union Naval Force Somalia* (EU NAVFOR) yang telah lebih dahulu beroperasi dengan *Atalanta Operation* sejak tahun 2008 yang diberi mandat oleh Uni Eropa sebagai *counter-piracy* di Teluk Aden. Kedua operasi ini memiliki mandat yang serupa guna mengatasi pembajakan di sekitar perairan Tanduk Afrika. *Counter-piracy* ini telah menjadi agenda keamanan global bagi NATO dalam meredam gelombang tindakan kriminal di wilayah perairan tersebut yang juga merupakan ancaman bagi perdamaian internasional dan mengganggu rantai pasokan keamanan energi di wilayah tersebut.

Operation Ocean Shield muncul sebagai bagian dari reaksi dunia internasional terhadap maraknya pembajakan kapal dengan motif meminta tebusan yang ikut berkembang dalam pusaran kekacauan perang saudara yang panjang di Somalia dan yang pada puncaknya merugikan industri pelayaran global sekitar US\$7 miliar per tahun dan sejumlah pelaut malang yang disandera oleh para pembajak. Kurang lebih sudah 1.000 pelaut yang menjadi korban penyanderaan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sementara permintaan tebusan untuk pengembalian sandera dan kapal terus mengalami peningkatan dari yang semula US\$ 150.000 pada tahun 2005 menjadi US\$ 5,4 juta lima tahun kemudian.⁹ Para perompak Somalia diperkirakan mendapatkan keuntungan sekitar US\$ 240 juta dari aksi kriminal pembajakan tersebut yang kemudian berakhir di tangan milisi Islam Somalia.¹⁰

Kemudian Dewan Atlantik Utara (*North Atlantic Council*) memberikan mandat politik kepada NATO dan sekutunya untuk berkontribusi pada misi *counter-piracy* di Tanduk Afrika melalui struktur komando NATO dan pendanaannya dilakukan secara bersama. Nantinya sekutu NATO

menyediakan kapal dan pesawat guna keperluan patroli maritim yang dilakukan secara bergilir atau dilakukan rotasi.¹¹ Pasukan Angkatan Laut NATO beroperasi di Tanduk Afrika, termasuk Teluk Aden dan Samudra Hindia Barat hingga Selat Hormuz, atau dapat dikatakan wilayah operasinya berukuran lebih dari 2 juta mil atau setara dengan ukuran Eropa Barat.

Kapal dan pesawat NATO telah berpatroli di laut lepas Tanduk Afrika sejak 2009 sebagai bagian dari upaya internasional yang luas—termasuk Operasi Atalanta Uni Eropa dalam memerangi pembajakan maritim. Lewat kedua operasi tersebut, jumlah insiden pembajakan di kawasan tersebut menurun secara drastis di mana tidak ada kapal komersial yang ditangkap antara Mei 2012 hingga tahun 2016.¹² Khususnya *Operation Ocean Shield* yang dianggap telah membantu secara signifikan mengurangi pembajakan di wilayah tersebut sehingga dianggap sebagai salah satu operasi NATO yang paling sukses.

NATO kemudian secara resmi mengakhiri operasinya pada 15 Desember 2016 dan mengklaim bahwa operasinya meraih hasil yang cukup sukses dan menyatakan bahwa misi tersebut telah mencapai tujuannya dimana kehadiran NATO yang cukup krusial di wilayah itu mampu mengatasi perompakan dan berhasil dalam tugas pengawalan dan penyelamatan awak kapal yang menjadi sandera. Kehadiran NATO sangat membantu negara-negara Afrika dan juga pihak lain seperti EUNAVFOR mengatasi perompakan yang terjadi di wilayah perairan Afrika itu.

KERANGKA TEORI

Teori Organisasi Internasional

Secara konseptual, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan

⁹Naval Technology, Operation Ocean Shield: mission success?, <https://www.naval-technology.com/features/featureoperation-ocean-shield-mission-success-5776043>, diakses pada 21 Oktober 2021.

¹⁰Ibid.

¹¹NATO, loc.cit.

¹²Naval Technology, loc.cit.

bersama dari para anggotanya.¹³ Atau singkatnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di dalam struktur internasional. Isu-isu yang terjadi di seputar masyarakat internasional yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah akan diselesaikan lewat organisasi internasional.¹⁴ Sebuah organisasi internasional dalam konteks ini mewakili bentuk institusi yang merujuk pada sistem yang memiliki aturan formal, tujuan, dan instrumen administratif yang rasional.

Organisasi Internasional sudah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, Archer mengklasifikasikannya berdasarkan :

1. Keanggotaan, dalam hal ini Archer membagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaannya. Menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau Intergovernmental Organizations (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau International Non-Governmental Organizations (INGO), dan ada juga organisasi internasional yang memiliki keanggotaan campuran seperti (ILO).
2. Tujuan dan aktivitas yang berkisar pada skala yang umum sampai spesifik dan juga dapat dibagi menurut apakah mereka berorientasi pada hubungan kerja sama antar anggota, menurunkan tingkat konflik mereka, atau menghasilkan konfrontasi antara anggota.
3. Struktur yakni bagaimana institusi membedakan antara satu anggota dan anggota lainnya; apakah mereka lebih egaliter atau tidak dalam perlakuan mereka terhadap anggota, tingkat independensi yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut dari pemerintah anggota, dan keseimbangan antara elemen pemerintah dan non-pemerintah di dalam institusi.¹⁵

Kemudian organisasi internasional juga dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori

berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosio-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah OKI, Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran NATO sebagai (IGO) dan juga komunitas keamanan yang memiliki tujuan perdamaian yang dalam hal ini mengatasi perompakan di wilayah perairan Tanduk Afrika. NATO dalam hal ini berperan sebagai organisasi yang juga harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama dalam hubungan masyarakat internasional atau disebut juga sebagai rezim keamanan. Dalam konteks keamanan maritim di kawasan Tanduk Afrika, negara yang tergabung dalam keanggotaan NATO memiliki *common-interest* berupa perlunya menjaga keamanan di kawasan perairan tersebut agar jalur pelayaran atau navigasi komersil tidak terganggu sebab negara anggota NATO secara ekonomi banyak beraktivitas di kawasan ini.

Konsep Kemanan Maritim

¹³Clive Archer, *International Organization* 3rd Edition (London and New York: Routledge, 2001), hlm. 2.

¹⁴Jan Klabbers, *Two Concepts of International Organization*, *International organizations law review*, 2(2), 2005, 277-293.

¹⁵Clive Archer, *op.cit.*, hlm. 64.

Konsep keamanan maritim didefinisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi, lingkungan, maupun warga negara itu sendiri dari ancaman keamanan yang terjadi di laut.¹⁶ Beberapa tindakan kriminal dapat diidentifikasi sebagai sebuah ancaman bagi keamanan maritime yang meliputi:¹⁷

1. *Piracy and armed robbery*, yang merupakan bentuk tindak kriminal di laut yang mengancam awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersil (sering kali).
2. *Terrorist acts*
3. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substance*
4. *Smuggling and trafficking of persons*
5. *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*
6. *Intentional and unlawful damage to the marine environment*

fokus kepedulian keamanan non-tradisional harus dialihkan dari negara menjadi kelompok atau individu dengan isu-isu yang bersifat non-militer seperti keamanan ekonomi, lingkungan, politik, termasuk keamanan maritim.¹⁸

Fenomena perompakan di wilayah *Tanduk Afrika* merupakan ancaman yang jangkauannya sangat luas karena berhubungan dengan ancaman ekonomi, militer, serta sumber daya. Ancaman juga tidak hanya di rasakan oleh kawasan itu saja (*Tanduk Afrika*) tapi juga negara-negara lain yang memiliki kepentingan ekonomi dan sumber daya yang melintas di perairan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan maritim untuk menjelaskan pentingnya NATO mengamankan wilayah tersebut dari perompak agar tercipta keselamatan maritim dan tercapainya tujuan negara-negara yang tergabung di dalam nya.

METODE PENELITIAN

¹⁶Natalie Klein, *Maritime Security and The Law of The Sea* (New York: Oxford University Press Inc, 2011), hlm. 11.

¹⁷Ibid, hlm. 18.

¹⁸Riana Ary M dan Nugraha Sudirman: "*Maritime Diplomacy sebagai strategi pembangunan keamanan maritime Inonesia*" *Jurnal Wacana Politik*" Vol. 1, No. 2, Oktober 2016 hlm 175-182 Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/wacana politik/article/download/11059/pdf>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, yaitu merupakan suatu upaya menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada pada rumusan masalah dengan penjelasan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dari fenomena yang diperoleh. Dengan metode eksplanasi, penelitian dapat dijelaskan secara lebih rinci berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam meneliti sebuah fenomena dan dikuatkan dengan data-data yang ditemukan. Keamanan maritim di *Tanduk Afrika* merupakan fenomena yang hendak penulis teliti dengan melihat efektivitas peran NATO di dalamnya dengan misi *Operation Ocean Shield* dalam mengatasi kejahatan transnasional yang mengancam keamanan kawasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Sejarah Konflik Wilayah Tanduk Afrika

Wilayah *Tanduk Afrika/African Horn* adalah wilayah dengan geografi unik yang membuatnya rentan terhadap pembajakan. Garis pantainya memiliki panjang sekitar 3.300 kilometer dan memiliki banyak teluk, ceruk, dan pulau yang menyediakan tempat persembunyian yang sangat baik bagi para perompak. Teluk Aden, yang menghubungkan Laut Merah ke Laut Arab, merupakan lokasi yang sangat penting untuk pembajakan karena merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selain itu, perairan *Tanduk Afrika* penuh dengan kehidupan laut, membuatnya menarik bagi para nelayan dan menjadi sumber pendapatan bagi para perompak yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Bagian dari wilayah *Tanduk Afrika* juga dikenal sebagai semenanjung *Somalia*; istilah ini biasanya digunakan untuk menyebut tanah *Somalia* dan *Ethiopia timur*.¹⁹ Secara lebih umum, istilah "*Tanduk Afrika*" juga digunakan untuk mendefinisikan wilayah politik yang terdiri dari *Djibouti*, *Etiopia*, *Eritrea*, dan *Somalia*. Beberapa definisi juga mencakup negara bagian *Kenya*, *Sudan*, dan *Tanzania*. *Tanduk Afrika* dianggap sebagai subkawasan dari wilayah yang lebih

¹⁹ *Ensiklopedia Britannica, African Horn*, diakses dari <https://www.britannica.com/place/Horn-of-Africa>

besar yang dikenal sebagai Afrika Timur, dan terkadang disebut sebagai Semenanjung Somalia.

Wilayah tanduk afrika sendiri memiliki sejarah konflik yang sangat panjang yang mendorong berkembangnya perompakan di wilayah tersebut, sejarah konflik ini dapat di bagi menjadi Perang antar negara dan Perang Saudara yang terjadi di wilayah tersebut.

1. Perang Antar Negara

Wilayah Tanduk Afrika telah mengalami lebih banyak perang antar-negara daripada wilayah lain di benua ini. Wilayah ini telah merasakan empat perang antar-negara. Perang-perang besar tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan perbatasan, karena batas-batas negara-negara di wilayah ini ditetapkan oleh kekaisaran pra-kolonial (seperti Kekaisaran Abyssinia di Ethiopia saat ini dan negara Mahdiyya di Sudan saat ini) dan negara kolonial. Di antara perang besar di wilayah tersebut adalah tiga perang yang terjadi antara Ethiopia dan Somalia. Perang pertama, terjadi karena klaim Somalia atas wilayah Ogaden di Ethiopia yang dihuni oleh orang Somalia, dimulai pada tahun 1961, meningkat pada tahun 1964 dan berlangsung hingga 1967 sebagai konflik intensitas rendah. Perang kedua antara Ethiopia-Somalia, yang lagi-lagi terjadi karena masalah Ogaden, berlangsung antara tahun 1977 dan 1978 dan melibatkan campur tangan langsung dari pihak eksternal, termasuk pasukan dan penasihat teknis dari Kuba dan Uni Soviet yang mendukung Ethiopia. Kekalahan dalam perang itu secara besar-besaran memicu runtuhnya negara Somalia pada tahun 1991. Perang ketiga antara kedua negara terjadi antara tahun 2006 dan 2009. Setelah satu setengah dekade tanpa negara, Somalia tampaknya telah berhasil mendirikan negara di bawah Serikat Pengadilan Islam/*Islamic Court Union* (ICU), yang menguasai sebagian besar wilayah Somalia pada bulan Juni 2006. Namun, Ethiopia melihat retorika Islamis dan aspirasi menyatukan semua orang Somalia di bawah satu negara dari ICU sebagai ancaman terhadap stabilitas dan integritas wilayahnya. Sebagai hasilnya, Ethiopia melakukan intervensi untuk menggulingkan ICU dari kekuasaan dan untuk mendukung Pemerintah

Federal Transisi (TFG), yang tidak efektif sejak konstitusinya pada tahun 2004 di Nairobi sebagai pemerintah Somalia. Invasi Ethiopia didukung oleh AS, yang juga memiliki kekhawatiran terhadap retorika Islamis dari ICU dan melihat beberapa pemimpin ICU memiliki koneksi dengan Al-Qaida. Ketua dewan ICU, Hassan Dahir Aweys, misalnya, termasuk dalam daftar 189 individu dan organisasi yang ditunjuk sebagai teroris di bawah Executive Order 13224 setelah 9/11.²⁰ Pasukan Ethiopia berhasil menggulingkan ICU dari kekuasaan tetapi tidak dapat meredakan konflik di Somalia. TFG/*Transitional Federal Government*, yang mengambil keuntungan dari kekuatan pasukan Ethiopia untuk berkuasa, memiliki sedikit legitimasi di Somalia. TFG secara luas dianggap sebagai ciptaan kekuatan luar dan sebagian besar terdiri dari para panglima perang yang telah membagi-bagi negara menjadi wilayah kekuasaan kecil. Setelah ICU digulingkan dari kekuasaan, kelompok pemberontak Islam yang lebih radikal, al-Shabaab, muncul dan, bersama dengan sisa-sisa ICU di bawah nama baru, Aliansi Pembebasan Kembali Somalia/*Alliance of Re-liberation of Somalia* (ARS), terus berperang melawan TFG dan pasukan Ethiopia. Dengan pasukan Ethiopia tidak dapat mengalahkan pemberontak dan posisi TFG semakin tidak mungkin, PBB memediasi negosiasi antara TFG dan sayap "moderat" dari ARS (ARS-Djibouti) di Djibouti.

Perang perbatasan antara Ethiopia dan Eritrea pada tahun 1998-2000 mungkin merupakan perang terbesar yang terjadi di wilayah ini dalam era pascapenjjajahan, setidaknya dari segi jumlah korban. Sengketa perbatasan di sekitar Badme, sebuah kota kecil di perbatasan barat daya Eritrea dan barat laut Ethiopia, eskalasi menjadi perang yang sepenuhnya pada bulan Mei 1998.

Pada bulan Desember 2000, Perjanjian Algiers ditandatangani untuk mengakhiri perang dan membentuk Komisi Batas Eritrea-Etiopia yang bertugas untuk menetapkan batas antara kedua negara. Pada tanggal 13 April 2002, komisi tersebut memberikan putusannya yang menetapkan seluruh

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11

perbatasan antara kedua negara berdasarkan perjanjian kolonial. Dengan putusan tersebut, kota Badme, tempat awal terjadinya perang, ditempatkan di Eritrea, namun Ethiopia, meskipun dengan enggan menerima putusan komisi, belum memperbolehkan penentuan batas secara fisik dilakukan di lapangan. Dalam ketiadaan kemajuan tersebut, komisi menyatakan tugasnya selesai setelah melakukan penentuan batas virtual. Namun, masalah perbatasan masih belum terselesaikan karena Ethiopia tidak memperbolehkan penentuan batas secara fisik maupun menerima penentuan batas virtual. Selain empat perang besar yang disebutkan di atas, wilayah ini juga telah menyaksikan konflik antar-negara yang lebih kecil. Konflik antara Kenya-Somalia selama Perang Shifta Kenya (1963-67) adalah salah satu contohnya. Uganda dan Sudan juga mengalami konflik bersenjata dan hubungan yang tegang atas tuduhan dukungan untuk kelompok pemberontak masing-masing. Dengan naiknya kekuasaan di Kampala pada tahun 1986 oleh Gerakan Perlawanan Nasional/*National Resistance Movement* (NRM), yang memiliki hubungan erat dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/*Sudan's People Liberation Movement* (SPLM), Sudan mengambil tindakan mendukung kelompok pemberontak Uganda, termasuk Pasukan Demokratis Sekutu/*Allied Democratic Force* (ADF) dan Tentara Perlawanan Tuhan/*Lord Resistance Army* (LRA), sebagai pembalasan atas dugaan dukungan Uganda terhadap SPLM. Bentrokan singkat di perbatasan antara Eritrea dan Djibouti pada bulan Juni 2008 juga merupakan salah satu konflik antar-negara di wilayah ini. Saat penulisan, sengketa perbatasan Eritrea-Djibouti masih belum terselesaikan, meskipun mediasi yang dipimpin Qatar telah berhasil mengurangi eskalasi konflik dan mencapai penarikan pasukan Eritrea dari daerah yang dipertentangkan.

2. Perang Saudara

Perang saudara di wilayah ini berbeda dalam cakupan dan intensitasnya, dan banyak di antaranya terkait erat dengan konflik antar-negara, karena dalam banyak kasus kelompok yang melawan negara baik bertindak sebagai proxy untuk negara lain atau didukung oleh

mereka. Pemerintah di Greater Horn telah campur tangan dalam konflik internal satu sama lain karena berbagai alasan. Beberapa mendukung pemberontakan di negara tetangga karena adanya ikatan etnis dengan kelompok yang memberontak. Tidak jarang juga kelompok pemberontak berbasis etnis memperoleh dukungan dari penduduk negara tetangga karena ikatan etnis, bahkan jika mereka tidak memperoleh dukungan langsung dari pemerintah negara-negara tetangga tersebut. Gerakan pemberontakan di wilayah Ogaden yang dihuni oleh orang-orang Somalia di Ethiopia, seperti Front Pembebasan Somalia Barat/*West Somalia Liberation Front* (WSLF), misalnya, didukung oleh negara Somalia sebelum runtuhnya pada tahun 1991. Perang Shifta di Provinsi Timur Laut Kenya yang dihuni oleh orang-orang Somalia juga didukung oleh negara Somalia, yang bercita-cita menyatukan semua wilayah yang dihuni oleh orang-orang Somalia di wilayah tersebut di bawah negara Somalia.

Dalam kasus lain, rezim dari negara-negara mendukung kelompok pemberontak dari negara tetangga sebagai perpanjangan dari kebijakan luar negeri mereka, termasuk destabilisasi rezim-rezim yang memiliki hubungan yang bersifat antagonis dengan mereka. Ethiopia dan Kenya merespons apa yang mereka anggap sebagai ancaman Somalia terhadap integritas nasional mereka dengan membentuk pakta pertahanan bersama pada tahun 1964. Selain itu, rezim-rezim Ethiopia yang berkelanjutan melawan dukungan Somalia untuk gerakan irredentis dengan membantu gerakan pemberontakan seperti Gerakan Nasional Somalia/*Somalia National Movement* (SNM) dan Front Demokrasi Penyelamatan Somalia (SSDF) melawan negara Somalia untuk melemahkan kemampuannya dalam mengejar klaimnya atas Ogaden. Pada awal 2000-an Ethiopia mendukung Dewan Restorasi dan Rekonsiliasi Somalia/*Somalia Restoration and Reconciliation Council* (SRRC) melawan Pemerintah Nasional Transisi. Saat ini Ethiopia mendukung TFG melawan pemberontakan al-Shabab-Hizbul Islamiya.

Perang saudara di wilayah ini tidak hanya produk dari keterlibatan proxy oleh

negara lain semata. Meskipun terlibat dalam perang melawan satu sama lain, rezim-rezim di wilayah ini juga telah bekerja sama untuk membendung aktivitas pemberontakan satu sama lain. Misalnya, Ethiopia di bawah Kaisar Haile Selassie setuju untuk tidak mendukung SPLM sebagai imbalan atas janji Sudan untuk tidak mendukung gerakan pembebasan Eritrea. Sebelum perang perbatasan mereka, Ethiopia dan Eritrea juga bekerja sama melawan kelompok pemberontak di wilayah Afar Ethiopia. Sudan dan Eritrea saat ini telah berhenti mendukung pemberontak satu sama lain. Sudan Selatan juga bekerja sama dengan Uganda melawan LRA.

Banyak dari perang saudara dipicu oleh faktor-faktor domestik, seperti masalah pengelolaan keragaman dan pembangunan negara, termasuk karakteristik negara yang tidak merata atau beretnis, meskipun beberapa bentuk intervensi eksternal mungkin juga terlibat. Yang lain adalah reaksi terhadap pemerintahan yang represif dan tata kelola yang tidak efektif, sementara yang lainnya dipicu oleh pertarungan kekuasaan intra-elite. Persaingan intra-elite seringkali mengarah pada persaingan antar-etnis. Beberapa perang saudara dipicu oleh perselisihan ideologis. Partai Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRP), sebuah organisasi kiri, yang melawan pemerintah militer pada akhir tahun 1970-an, adalah contohnya.

Kebangkrutan negara Somalia pada tahun 1991 mengakibatkan terjadinya perang saudara di negara itu. Sejak kebangkrutan tersebut, negara ini telah mengalami perang antara berbagai warlord, 1991-2006; di Puntland melawan negara yang rapuh Somalia, 2004; ICU vs. Aliansi untuk Restorasi Perdamaian dan Kontra-Terrorisme (ARPCT), 2006; TFG vs. ICU, 2005-06; TFG melawan al-Shabaab dan Hizbul Islamiya, 2009-sekarang.

Selain perang saudara, negara-negara di Tanduk Afrika juga menghadapi banyak konflik bersenjata antar-komunal. Konflik-konflik ini sering terjadi antara kelompok etnis dan kelompok klan atas sumber daya seperti tanah, air, bahkan ternak. Meskipun tidak terbatas pada penggembala, konflik-konflik ini cenderung memengaruhi

komunitas-komunitas tersebut secara tidak proporsional. Dalam beberapa kasus, pemerintah memperburuk konflik dengan ikut campur di salah satu pihak, seperti kasus Darfur di Sudan dan Gambella di Ethiopia. Jika kelompok identitas tertentu melakukan pemberontakan atau menentang kebijakan, pemerintah cenderung ikut campur dalam konflik-konflik antar-komunal dengan mendukung kelompok identitas yang bersaing. Dalam kasus lain, persaingan antar-komunal atas sumber daya dapat intensif menjadi konflik mematikan, karena pemerintah tidak mampu menangani konflik-konflik tersebut dengan tepat waktu. Konflik-konflik antar-komunal yang tak terhitung jumlahnya, yang seringkali menjadi semakin intensif dengan ketersediaan senjata kecil, telah berkontribusi pada ketidakstabilan dan gangguan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun konflik-konflik ini sporadis dan intensitasnya jauh lebih rendah daripada perang antar-negara dan perang saudara, namun karena frekuensinya yang tinggi, konflik-konflik tersebut sangat merusak. Konflik-konflik antar-komunal di wilayah Jonglei di Sudan Selatan, misalnya, diperkirakan telah mengakibatkan lebih dari 2.500 kematian dan pengungsi sekitar 350.000 orang pada tahun 2009 saja (BBC News online, 22 Januari 2010).²¹

Secara keseluruhan, kondisi geografis di Tanduk Afrika, yang mencakup Somalia, Djibouti, Etiopia, dan Eritrea, telah menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan perompakan. Kondisi geografis memainkan peran penting dalam masalah perompakan di daerah ini.

Salah satu faktor geografis utama yang menyumbang pada perompakan di Tanduk Afrika adalah garis pantai yang panjang dengan banyak pelabuhan dan jalur pelayaran. Garis pantai membentang selama lebih dari 3.000 kilometer dan memiliki lebih dari 50 pelabuhan, sehingga sulit untuk memantau dan mengendalikan semua kapal yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Hal ini memudahkan bagi perompak untuk beroperasi di area tersebut, karena mereka dapat dengan

²¹ *Ibid.*, hlm 16

mudah mendekati dan menaiki kapal tanpa terdeteksi.

Faktor geografis lain yang berkontribusi pada perompakan di Tanduk Afrika adalah kurangnya keamanan maritim yang efektif. Hal ini disebabkan sebagian oleh luasnya lautan yang harus dimonitor, serta keterbatasan sumber daya angkatan laut dan penjaga pantai lokal. Besarnya wilayah yang harus dipantau, dikombinasikan dengan kekurangan pasukan keamanan, membuat lebih mudah bagi perompak untuk melancarkan serangan.

Selain itu, perairan dangkal di lepas pantai Somalia dan Teluk Aden memberikan lokasi yang nyaman bagi perompak untuk mengikat kapal mereka dan memegang kapal yang direbut, karena sulit diakses oleh kapal laut yang lebih besar. Perairan dangkal juga memberikan lingkungan yang cocok untuk kapal cepat kecil yang biasa digunakan oleh perompak untuk beroperasi.

Akhirnya, kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi di daerah tersebut telah berkontribusi pada meningkatnya perompakan. Dengan sedikit pilihan lain yang tersedia, para pemuda beralih menjadi perompak sebagai cara untuk mencari nafkah. Keputusan ekonomi, dikombinasikan dengan faktor geografis lain yang disebutkan di atas, telah membuat perompakan menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang di daerah tersebut.

Krisis Keamanan Maritim di Tanduk Afrika

Kawasan perairan Tanduk Afrika merupakan zona yang sangat strategis mengingat kawasan ini dilewati oleh jalur perdagangan yang sangat penting bagi dunia internasional. Mulai dari Teluk Aden, Laut Merah, hingga ke Terusan Suez merupakan bagian dari jalur perdagangan yang sangat penting antara Asia dan Eropa di pantai timur Amerika Utara, dimana rute ini diketahui sebagai rute terpendek dari Asia menuju Eropa dan Amerika Utara.²² Namun keuntungan strategis tersebut juga

²² Bernard Wiśniewski dan Szymon Siódmak, "Problems of sea route planning for a ship operating in piracy-threatened areas: the Indian Ocean", *Scientific Journals* 26(98), 2011, hlm. 115.

menimbulkan potensi kejahatan transnasional seperti perompakan.

Perompakan merupakan permasalahan global dan kejahatan kriminal yang bersifat universal.²³ Permasalahan ini telah ada sejak orang mulai berlayar melintasi lautan dan samudera. Terlebih dengan semakin meningkatnya aktivitas pelayaran di seluruh dunia, maka potensi ancaman perompak juga ikut meningkat. Majalah *Foreign Affairs* memperkirakan bahwa perompakan menyebabkan kerugian rata-rata 13-16 miliar USD bagi perusahaan transportasi per tahun dimana mayoritas serangan perompak saat ini terjadi di Samudra Hindia yang jalurnya digunakan oleh lebih dari 50.000 kapal komersial setiap tahunnya.²⁴ Bahkan dengan membajak beberapa kapal yang lebih besar sudah cukup untuk menjaga negara-negara kecil asal para perompak untuk tetap bertahan. Dari Samudra Hindia hingga ke lepas pantai Tanduk Afrika yang menonjol di Somalia saat ini, di perairan yang dikenal sebagai Teluk Aden dan sekitarnya, momok pembajakan modern terkonsentrasi secara khusus dikarenakan wilayah ini selama ribuan tahun telah berfungsi baik sebagai jalur pelayaran utama bagi perusahaan transnasional meskipun secara geografis sangat kecil.

Dalam konteks perairan Tanduk Afrika, meningkatnya aktivitas pelayaran di kawasan tersebut bukan menjadi penyebab tunggal munculnya perompakan. Konflik sipil yang berkepanjangan yang terjadi di negara-negara Tanduk Afrika dan faktor kemiskinan juga menjadi akibat munculnya perompakan di kawasan tersebut. Seperti contoh Somalia yang mengalami peningkatan perompak setelah mengalami gejolak politik dan perang saudara ketika rezim diktator Mohamed Siad Barre mengalami keruntuhannya pada bulan Januari tahun 1991.²⁵ Perang saudara tersebut

²³ Bento Lucas, "Toward an international law piracy sui generis: how the dual nature of maritime piracy enables piracy to flourish," *Berkeley Journal of International Law* 29 (2011), hlm. 399.

²⁴ Gal Luft dan Anne Korin, *Terrorism Goes to Sea*, *Foreign Affairs*. November-December 2004.

²⁵ Niklas Novaky, *Deploying Military Force Under CSDP: The case of EU Navfor Atalanta*. UACES Annual Conference. Hlm. 6.

memunculkan geng-geng kecil mantan milisi yang kemudian membentuk kelompok-kelompok atau sindikat yang melakukan kegiatan di darat dengan mendirikan pos-pos penjagaan untuk meminta pungutan kepada setiap kendaraan yang lewat, namun hal itu kemudian mengarahkan mereka untuk bekerja sama dengan nelayan pesisir untuk menyerang banyak kapal komersial asing yang melintasi Teluk Aden dan lepas pantai Somalia dalam perjalanan mereka menuju ataupun dari Terusan Suez.²⁶

Kegiatan perompakan ini pun kemudian terus berkembang dimana upaya yang semula hanya meminta pungutan kemudian berubah menjadi aksi penyanderaan terhadap awak kapal untuk kemudian meminta tebusan pada perusahaan pemilik kapal dengan nominal tinggi bahkan hingga mengancam keselamatan sandera agar tuntutan mereka dapat terpenuhi. Dalam beberapa kasus tak jarang para perompak melukai dan menimbulkan korban jiwa pada sandera yang ditangkap ketika proses negosiasi berlangsung lama dan alot. Tidak berhenti sampai di situ, para perompak kemudian menginvestasikan sebagian hasil keuntungan dari uang tebusan dalam bentuk peralatan pendukung berupa perahu cepat, senjata api, alat komunikasi, dan peralatan pendeteksi kapal yang cukup canggih sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan aksi perompakan dengan intensitas yang masif dan dalam jangkauan serangan yang lebih luas. Perompakan yang semula hanya dianggap sebagai ancaman dalam negeri dan telah ada sejak tahun 1950an kini telah bertransformasi menjadi sindikat kriminal yang lebih profesional.

Kawasan Rawan Perompakan/High Risk Area for Piracy

Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu area dengan tingkat risiko yang tinggi akan perompakan atau *high risk area for piracy* (HRA) setelah ditetapkan oleh mekanisme tata kelola internasional ad-hoc yang bernama Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) pada tahun 2011 yang mencakup kawasan perairan

terusan Suez, Selat Hormuz, lepas pantai timur Somalia, dan daerah pesisir lainnya.²⁷ *Warlike area* dan *high risk area* adalah bagian dunia yang dianggap memiliki tingkat paparan risiko keselamatan dan nyawa yang tinggi akibat perang, ketegangan militer, permusuhan, aktivitas perompak, dan keadaan lain yang menyebabkan bahaya langsung bagi kapal yang melintas beserta kru nya. Sebelumnya telah diketahui bahwa fenomena perompakan di Tanduk Afrika merupakan produk dari instabilitas sosial-politik dan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut, terutama Somalia yang posisinya sangat strategis karena pesisir pantainya membentang dari Samudera Hindia hingga ke Teluk Aden yang keduanya merupakan jalur pelayaran internasional. Setelah 22 tahun kediktatoran Siad Barre dan 18 tahun perang saudara, pemerintah di Somalia mengalami keruntuhan pada tahun 1991 sehingga negara secara efektif terpecah menjadi tiga:

1. Negara bagian timur-laut Somaliland yang merdeka
2. Wilayah semi-otonom tengah Puntland, dan
3. Negara bagian barat daya Somalia

Dengan terbaginya Somalia menjadi tiga bagian tersebut, terdapat dua jaringan utama perompak Somalia yang diketahui oleh dunia internasional yakni kelompok yang berbasis di Puntland Utara yang semi-otonom di distrik Eyl dan kelompok lain yang berbasis di Haradheere di Somalia Tengah.²⁸ Sedangkan kelompok bajak laut yang lebih kecil yang telah diakui keberadaannya beroperasi dari pelabuhan Bosaso, Qandala, Caluula, Bargaal, Hobyo, Mogadishu dan Garad.²⁹ Dengan beroperasinya dua jaringan utama dan beberapa kelompok kecil perompak tersebut, beberapa lokasi di

²⁷ International Maritime Organization, Piracy and Armed Robbery Against Ships in Waters off the Coast of Somalia, diakses dari <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC.1.Circ.1332.pdf>, pada 4 Juli 2022.

²⁸ United Nations Security Council, Report of the Secretary General pursuant to Security Council resolution 1846 (2008), S/2009/146, 16 March 2009, hlm. 5.

²⁹ Ibid.

²⁶ Scott Baldauff, Piracy raises pressure for new international tack on Somalia, *The Christian Science Monitor*, diakses, pada 4 Juli 2022.

perairan Tanduk Afrika menjadi titik rawan perompakan yang diantaranya adalah:

1. *Gulf Aden Attack Zone* (masuk Somali Land). Lokasinya di dalam area Teluk Aden berbatasan dengan Yaman. Lebar areal rata-rata 50 mil dan panjang 100 mil.
2. *Mogadishu Attack Zone* (masuk Puntland). Area mereka adalah Puntland. Lokasi (lapak) daerah kekuasaan berada antara 100-600 mil dari perbatasan Kenya hingga ke arah Timur perairan Somalia atau menuju ke arah Teluk Aden.
3. *Somalia Stay Away Zone*. Lokasinya berada di pantai Somalia. Area antara 170-300 mil dari lepas pantai Somalia bagian Utara.
4. *Eyl Ransome Zone* (masuk Puntland). Ini adalah lokasi paling berbahaya diantara sejumlah lokasi. Lokasi ini menjadi pusat logistik dan informasi bagi para perompak yang bertugas menyerang kapal yang dilaporkan oleh pemberi informasi.
5. *Hoby Ransom Zone* (masuk Puntland). Lokasinya dekat kota Pelabuhan Hobyo dan Mudug di perairan Somalia selebar 50 Km dan panjang sejauh 600 Km dari bibir pantai ke arah Lautan Hindia.
6. *Haradhere Ransome Zone* (masuk Puntland). Kota Haradhere ini bukan kota pelabuhan sehingga kapal yang mereka bajak akan di bawa ke Hobyo.
7. *Mogadishu Mothership Home Port*. Area operasinya seluas 250 mil laut dari kota Mogadishu dan menguasai areal Samudera Hindia pada jangkauan lebar 50 mil laut.
8. *Bosaso Zone* (masuk Somali Land). Adalah sebuah kota pelabuhan besar di Somalia setelah Mogadishu.

Dampak Perompakan di Tanduk Afrika

Jumlah tebusan yang diminta oleh kelompok perompak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari puluhan ribu dolar menjadi ratusan ribu bahkan jutaan. Pada tahun 2008, rata-rata uang tebusan diperkirakan antara USD 500.000 hingga USD 2 juta, dan pada tahun 2009 tampaknya

masih terus meningkat. Menurut Laporan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan tentang keadaan pembajakan di Somalia pada tahun 2009, Eyl Group sendiri telah menyandera enam kapal beserta awaknya dan diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar USD 30 juta untuk membayar tebusannya pada akhir tahun 2008.³⁰ Sementara beberapa pemilik kapal enggan untuk mengungkapkan biaya yang dihabiskan untuk membayar tebusan, namun menurut beberapa laporan diperkirakan pembayaran tebusan pada kurun waktu tersebut lebih dari USD 5 juta.³¹

Korban terbesar dari pembajakan ini tidak diragukan lagi adalah orang Somalia itu sendiri. Di atas konflik yang sedang berlangsung dan permasalahan sosio-ekonomi lainnya, Somalia juga menderita bencana kekeringan selama empat tahun dan diperkirakan sekitar 3,2 juta orang Somalia atau sekitar 43% dari populasi bergantung pada bantuan pangan di akhir tahun 2008. Sekitar 95% pasokan bantuan dari dunia internasional ke Somalia dikirim melalui laut. *World Food Programme* (WFP) mengirimkan sekitar 30.000 hingga 40.000 metrik ton bantuan pangan per bulan ke wilayah Tanduk Afrika. Sebagai akibat dari serangan terhadap kapal pembawa bantuan, WFP melaporkan bahwa pengiriman bantuan makanan ke Mogadishu menjadi lebih mahal dan berbahaya.³²

Sejak akhir 2008, selain harus membayar premi asuransi yang lebih tinggi, pengiriman WFP juga memerlukan pengawalan dari angkatan laut Uni Eropa atau Kanada. Sementara beberapa perompak Somalia telah setuju untuk tidak menargetkan kapal yang membawa bantuan kemanusiaan dan kapal komersial pendukung lainnya, 10 serangan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan masih belum berhenti. Misalnya, pada April 2009, perompak

³⁰ United Nations Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1846 (2008), S/2009/146, 16 March 2009, hlm. 25.

³¹ Robert Wright, Somali Pirates Free Tanker After Record Ransom, *Financial Times*, 18 January 2010.

³² Untuk lebih lanjut lihat website WFP, www.wfp.org, seperti contoh 'Security stops WFP in southern Somalia,' 6 January 2010.

Somalia membajak MV *Maersk Alabama* dan menyerang MV *Liberty Sun*, baik kapal kargo berbendera AS maupun berawak yang dikontrak oleh WFP untuk mengirimkan bantuan makanan di lepas pantai tenggara Somalia.³³ Pada November 2009, MV *Maersk Alabama* kembali diserang, meskipun para kru berhasil menghalau serangan tersebut.³⁴

Perompak Somalia pada dasarnya juga tidak diuntungkan dari aksi kejahatannya. Hanya sebagian dari uang hasil perompakan masuk ke kantong mereka. Pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata yang menguasai berbagai negara bagian terutama di Puntland juga menikmati uang haram tersebut meskipun jumlah pastinya tidak diketahui. Menurut satu rincian, perompak yang terlibat dalam pembajakan sebenarnya hanya menerima 30% dari uang tebusan karena harus menutup pengeluaran mereka terhadap hal-hal lain. Kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai wilayah tempat para perompak bermarkas dapat mengklaim 10% dari uang tebusan sebagai bentuk pajak, dan para tetua dan pejabat setempat mungkin juga mendapatkan bagian yang sama. Pemodal operasi perompakan dapat mengambil 20% sebagai bunga atas dana yang telah diinvestasikan, dan akan mengklaim bagian 30% jika mensponsori perompak secara penuh.³⁵ Menurut seorang perompak yang dihukum, seorang perompak bersenjata dapat memperoleh antara USD 6.000 hingga USD 10.000 dengan asumsi jika mereka mendapatkan uang tebusan sebesar USD 1 juta.³⁶

Ancaman terhadap keamanan energi dari perompakan maritime juga menjadi masalah yang serius. Pada November 2008, *Sirius Star* yang membawa dua juta barel

³³ ICC-International Maritime Bureau. Piracy and armed robbery against ships: 2009 Annual Report, January 2010

³⁴ EU NAVFOR Somalia, *Maersk Alabama evades pirate attack off Somali coast*, 18 November 2009.

³⁵ BBC mengklaim bahwa angka-angka ini diambil dari laporan PBB yang telah mengumpulkan informasi dari bajak laut berbasis di desa timur laut Eyl. Lihat Harper, Mary, "Chasing the Somali Piracy Money Trail," BBC, May 24, 2009.

³⁶ Dikutip dari Saskia Van Huijgevoort, 'Piracy: coast guards become pirates,' Radio Netherlands Worldwide, July 1, 2009.

minyak mentah dari Arab Saudi ke Amerika Serikat (senilai sekitar \$100 juta)³⁷ menjadi kapal tanker minyak terbesar yang direbut oleh para perompak. Kapal tersebut disandera selama dua bulan sebelum dibebaskan atas pembayaran tebusan.

Serangan itu menjadi perhatian khusus karena dua alasan:

Pertama, selain menjadi kapal energi terbesar yang pernah diculik, itu juga kapal terbesar dari jenis apa pun yang pernah diculik sebagai sandera. Selain itu, jangkauannya jauh lebih jauh dari perompak Somalia yang pernah beroperasi; diperkirakan bahwa para perompak harus melakukan perjalanan tiga hingga empat hari di laut untuk mengintersep kapal itu. Serangan tersebut menunjukkan bahwa para perompak dapat beroperasi di wilayah lebih dari satu juta mil persegi, jauh di luar jangkauan patroli internasional di Teluk Aden.

Kedua, karena sifat kargo, ada kekhawatiran bahwa penculikan tersebut mungkin merupakan eskalasi dalam tujuan dan ambisi para perompak. Kapal tanker minyak sebesar ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan jika dijalkan di karang, tenggelam, atau terbakar.

Peran NATO Menangani Krisis Keamanan Maritim

Kerjasama dalam Melawan Perompak

NATO dapat mencapai sinergitasnya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Tiga besar operasi angkatan laut di perairan Tanduk Afrika yaitu *Combined Maritime Forces* yang dipimpin Amerika Serikat, *Operation Ocean Shields*, dan *the European Union's EUNAVFOR Atalanta* mulai mengerjakan rencana operasional bersama untuk memaksimalkan efek dan dampak dari setiap operasi dalam misi *counter-piracy*. *Operation Ocean Shields* sangat penting dalam memperkenalkan serangkaian mekanisme koordinasi ini. Namun hal itu hanya bersifat informal dan tidak menyiratkan struktur komando yang sama.

Yang pertama adalah apa yang disebut pertemuan *Shared Awareness and Deconfliction (SHADE)* yang diadakan di Bahrain. SHADE menawarkan mekanisme

tidak hanya untuk menghilangkan konflik, tetapi juga untuk meningkatkan dan berbagi taktik.³⁸ Wadah kerja sama ini adalah katalis utama untuk memperkenalkan koridor transit untuk pengiriman di Teluk Aden dan meminimalkan waktu respons terhadap laporan insiden. Melalui informalitas perencanaan operasional umum SHADE di seluruh organisasi tersebut memungkinkan adanya mandat/perintah. Segera setelah itu, negara-negara lain yang beroperasi secara independen, seperti Cina, India, Jepang, Rusia, India, dan Korea Selatan, bergabung dengan SHADE dan bekerja sama erat dengan NATO. SHADE juga menjadi dasar peluncuran platform berbagi informasi elektronik. Sistem yang disebut *Mercury* yang dikenal sebagai “*Facebook of counter-piracy*” – memungkinkan pertukaran posisi aset secara real-time dan penyebaran laporan insiden dengan cepat. Informalitas dan teknologi berbagi informasi baru memberikan dasar untuk mencapai sinergi lintas mandat dan organisasi.

Selain menekan pembajakan, *Operation Ocean Shield* telah meningkatkan kesadaran situasional Aliansi di kawasan strategis Tanduk Afrika dan meningkatkan hubungan dengan sejumlah negara Afrika dan Arab. Namun yang lebih penting, operasi ini dapat menyediakan forum praktis untuk kerja sama dan interoperabilitas dengan sejumlah mitra keamanan baru. Setelah mengerahkan kapal ke Teluk Aden dan Samudera Hindia yang lebih luas selama hampir lima tahun, Aliansi telah memperoleh banyak intelijen regional dan kesadaran situasional dan hal ini adalah bentuk upaya kolaboratif karena informasi yang dikumpulkan tidak hanya oleh kapal NATO dan pesawat terbang, melainkan juga disediakan oleh mitra kontra-pembajakan dan kapal komersial yang melapor ke *NATO Shipping Center* di Northwood.³⁹

Dengan kemampuan intelijen yang lebih baik tersebut secara operasional telah menghasilkan operasi *counter-piracy* yang

lebih efektif. Melalui upaya pengawasan, laporan Bank Dunia baru-baru ini mencatat bahwa NATO telah mengidentifikasi beberapa pelabuhan di sepanjang pantai Somalia dan Yaman di mana kapal induk bajak laut menjadi tempat memasok secara rutin.⁴⁰ Jenis informasi ini memungkinkan pasukan angkatan laut koalisi untuk mencegah kelompok aksi bajak laut sebelum mereka dapat mencapai tempat berburu tujuan mereka. Daerah operasi para perompak, khususnya di sepanjang Teluk Aden, juga menjadi tuan rumah bagi teroris, penyelundup manusia, pengedar narkoba, dan penyelundup senjata. Lebih lanjut dilaporkan bahwa beberapa geng bajak laut tumpang tindih dengan penyelundup senjata di Somalia Tengah dan pedagang manusia di Puntland utara.⁴¹ Meskipun mandat *Operation Ocean Shield* tidak mencakup secara eksplisit seluruh ancaman ini, kehadiran angkatan laut NATO di kawasan tersebut tidak diragukan lagi membuat lingkungan operasi bagi teroris dan pedagang ilegal menjadi lebih sulit.

Kerja sama dengan Sektor Swasta

NATO juga belajar bagaimana bekerja dengan sektor swasta. Koordinasi angkatan laut yang erat dilakukan setiap hari adalah salah satu faktor utama keberhasilan dalam membendung dan melawan perompakan. Keberhasilan operasi ini tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan peran sektor swasta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, aliansi bekerja sama erat dengan pelaku industri dan kendaraan inti adalah Pusat Pengiriman NATO. Pusat ini sangat penting dalam menginformasikan industri perkapalan tentang sifat ancaman pembajakan yang terus berkembang dan konsekuensinya bagi bisnis. Itu juga berperan penting dalam bekerja menuju serangkaian tindakan umum yang dikenal sebagai *best management practices* (BMP) untuk mencegah pembajakan Somalia.⁴² Keberhasilan BMP menunjukkan setidaknya dalam dua hal. Pertama, BMP dikembangkan dalam bentuk kemitraan

³⁸ Christian Bueger, Op.cit., hlm. 39.

³⁹ Interview ofisial NATO, Operations Division, NATO HQ, May 13 2013 dalam James M. Bridger, “Safe Seas at What Price the Costs Benefits and Future of NATO’s Operation Ocean Shield,” *NATO Research Paper* No. 95 (September 2013): hlm. 5.

⁴⁰ The World Bank Regional Vice-Presidency for Africa, “The Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation”, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2013, hlm. 90.

⁴¹ Ibid, hlm. 89.

⁴² Christian Bueger, Op.cit., hlm. 40.

publik-swasta. Awalnya dirancang oleh sekelompok perwakilan industri, pedoman tersebut kemudian disempurnakan dan diselesaikan dalam konsultasi dengan *International Maritime Organization* (IMO) serta Contact Group to Counter Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) PBB. BMP adalah bentuk pengaturan diri, dan kepatuhan ditegakkan sendiri atau didukung oleh polis asuransi. Kedua, landasan BMP adalah kerja sama antara lembaga negara dan industri. Perusahaan pelayaran setuju untuk berkoordinasi dengan badan angkatan laut dengan mendaftarkan pergerakan mereka. Koordinasi antara badan-badan swasta, yaitu para pelaku dari industri perkapalan, perikanan dan sumber daya, dan badan-badan negara yang sangat penting untuk keamanan maritim. Ini juga termasuk hubungan antara penyedia keamanan swasta dan aktor negara.⁴³ Hal ini selain memungkinkan pengurangan waktu respons terhadap serangan pembajakan, juga dapat meningkatkan pemantauan aktivitas pembajakan. Melihat sektor swasta sebagai mitra dan berkomunikasi secara dekat merupakan faktor penting keberhasilan.

Operation Ocean Shield

Operation Ocean Shield adalah kontribusi NATO dalam memerangi perompakan atau *counter-piracy* di Teluk Aden, Samudra Hindia, dan Laut Arab yang merupakan bagian dari *Operation Enduring Freedom – Horn of Africa* (OEF-HOA) yang beroperasi dari Agustus 2009 hingga Desember 2016.⁴⁴ Peran NATO di kawasan tersebut adalah untuk memberikan pengawalan angkatan laut dan postur pencegahan sambil meningkatkan kerja sama dengan operasi *counter-piracy* lainnya, yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Sebelumnya NATO telah melakukan operasi *counter-piracy* di wilayah Tanduk Afrika yang bernama *Operation Allied Provider* pada Oktober 2008 sebagai pasukan

perlindungan sementara untuk pengiriman bantuan program pangan dunia atau *World Food Program* (WFP) di wilayah tersebut. Pada bulan Desember 2008, NATO mengakhiri *Operation Allied Provider* dan mengalihkan tanggung jawab perlindungan WFP ke operasi angkatan laut baru Uni Eropa. Kemudian pada bulan Maret 2009, NATO meluncurkan misi *counter-piracy* baru bernama *Operation Allied Protector* yang dikomandoi oleh *Standing NATO Maritime Group 1* (SNMG1). Kelompok ini bertindak untuk mencegah, mempertahankan, dan mengganggu aktivitas perompak atau melakukan misi *counter-piracy* hingga 20 Juni 2009. Baru kemudian pada Agustus 2009 NATO mengganti operasi tersebut dengan *Operation Ocean Shield* yang dikomandoi oleh SNMG2.⁴⁵

Tujuan operasi ini tidak seperti dua misi sebelumnya yang hanya melakukan tugas pengawalan, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan integrasi negara-negara non-anggota. Menurut Isaac Kfir, OOS “dirancang untuk tidak hanya mempromosikan keamanan angkatan laut tetapi juga menjalin hubungan dengan negara-negara di luar wilayah seperti Selandia Baru, Australia, dan Jepang.”⁴⁶ Hal ini dilakukan di bawah naungan Badan Keamanan PBB yang terdaftar sebelumnya dalam Resolusi Dewan Keamanan atau *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) dan juga UNSCR 1897 (2009); 1918 dan 1950 (2010); 1976, 2015 dan 2020 (2011). Dalam melakukan operasi ini NATO bermitra bersama dengan Uni Eropa dan Pasukan Maritim Gabungan yang dipimpin Amerika Serikat dalam pertemuan *Shared Awareness and Deconfliction* (SHADE) yang memungkinkan pengorganisasian bersama dengan 30 negara yang beroperasi di wilayah tersebut untuk mengoordinasikan upaya

⁴³ Ibid.

⁴⁴ NATO Allied Maritime Command, *Operation Ocean Shield*, *nato.int*, diakses dari <https://mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield>, pada 20 Juli 2022.

⁴⁵ Lauren Ploch et.al, *Piracy off the Horn of Africa*, *Congressional Research Service*, diakses dari <https://sgp.fas.org/crs/row/R40528.pdf>, pada 20 Juli 2022.

⁴⁶ Isaac Kfir, *NATO’s Paradigm Shift: Searching for a Traditional Security-Human Security Nexus*, *Contemporary Security Policy* 36, no. 2 (July 8, 2015): hlm. 235, <https://doi.org/10.1080/13523260.2015.1061766>

mereka dalam melakukan *counter-piracy*.⁴⁷ Pertemuan tersebut antara lain melibatkan Australia, Bahrain, China, Mesir, India, Yordania, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Seychelles, Singapura, Korea Selatan, Ukraina, dan Yaman.

Komando dan Kontrol operasi dilakukan oleh rantai komando militer NATO, dengan Komandan Sekutu Tertinggi Eropa atau *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR) mendelegasikan komando operasional kepada Komando Maritim NATO di Northwood, Inggris. Sekutu NATO menyediakan kapal dan pesawat patroli maritim untuk Kelompok Maritim Tetap NATO, yang pada gilirannya menugaskan sejumlah kapal secara bergilir ke *Operation Ocean Shield*.⁴⁸

Kesiapan Operasi

Ancaman keamanan maritim harus dilihat sebagai sesuatu yang saling bergantung (interdependensi) dan tujuan utamanya harus untuk mengatasi spektrum penuh dari ketidakamanan maritim. Jika garis pantai, zona ekonomi eksklusif, atau laut internasional tidak daitur dengan ketat, maka laut akan menjadi tuan rumah bagi berbagai kegiatan ilegal seperti pembajakan, *illegal fishing*, terorisme dan sebagainya. Aktivitas ilegal tersebut meskipun berbeda jenis namun akan saling bergantung dan menjadi pemicu satu sama lain.⁴⁹ Oleh karena itu, kesiapan strategi dan mekanisme pencegahan menjadi sangat penting.

NATO siap ketika yang lain tidak. Pada tahun 2008, komunitas internasional menghadapi eskalasi serangan di lepas pantai Somalia. Dewan Keamanan PBB menyatakan perompakan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi 1816 meminta negara-negara untuk melindungi pelayaran internasional dari pembajakan. Setelahnya, NATO pun segera meluncurkan operasi pertamanya dengan

Allied Provider. Namun, operasi ini hanya dimaksudkan untuk sementara.

Uni Eropa pun kemudian mengumumkan kesediaannya untuk mengorganisir operasi angkatan laut untuk menggantikan kekuatan tersebut. Namun, Uni Eropa membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat meluncurkan beroperasi laut gabungannya sehingga kemudian NATO meluncurkan misi keduanya yaitu *Allied Protector*.⁵⁰ Begitu EUNAVFOR berada telah siap, NATO memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya dalam counter-piracy di perairan Tanduk Afrika. *Operasi Ocean Shields* kemudian lahir karena pasukan EUNAVFOR tidak cukup untuk menangani krisis keamanan laut yang sedang berlangsung. Serangan pembajakan terus meningkat dan ratusan pelaut disandera. Aliansi ini kemudian menjadi kekuatan utama dalam merespon krisis keamanan yang tak ternilai di laut, sehingga mempertahankan kapasitas operasinya ini akan terus menjadi vital.⁵¹

Timeline Operation Ocean Shield

Pada tahun 2008, atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO mulai mendukung upaya internasional untuk memerangi pembajakan di Teluk Aden, di lepas pantai Tanduk Afrika, dan di Samudra Hindia dengan *Operation Allied Provider* dan *Allied Protector*. Sejak Agustus 2009, NATO kemudian memimpin *Operation Ocean Shield* yang membantu mencegah dan mengganggu serangan bajak laut, sekaligus melindungi kapal dan membantu meningkatkan tingkat keamanan umum di wilayah tersebut. NATO bekerja sama erat dengan aktor-aktor lain di kawasan itu termasuk *European Union's Operation Atalanta*, Satuan Tugas Gabungan 151 yang dipimpin AS atau *the US-led Combined Task Force 151*, dan kontributor masing-masing negara.

Kehadiran kekuatan angkatan laut internasional ini menghalangi para perompak untuk mengejar aktivitas mereka dan

⁴⁷ European Union Common Security and Defence Policy, EU Naval Operation against Piracy (EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA), EU Council Secretariat, February 2010, dan Combine Maritime Task Forces (CMF), CTF 151: Counter-Piracy, Combined Maritime Forces, September 16, 2017.

⁴⁸ NATO Allied Maritime Command, loc.cit.

⁴⁹ Ibid, hlm. 39.

⁵⁰ Carmen Gebhard dan Simon J Smith, "The two faces of EU-NATO cooperation: Counter-piracy operations off the Somali coast," *Cooperation and Conflict* 2015, Vol. 50(1): hlm. 108, DOI: 10.1177/0010836714532917.

⁵¹ Gareth Evans, loc.cit.

berkontribusi pada penumpasan pembajakan di wilayah tersebut. Penerapan *Best Management Practice* (BMP) oleh industri perkapalan, serta pemberangkatan tim keamanan bersenjata di kapal, juga berkontribusi terhadap tren ini. Dengan tidak adanya serangan pembajakan yang berhasil sejak 2012, NATO mengakhiri Ocean Shield pada 15 Desember 2016. Namun, NATO tetap terlibat dalam perang melawan pembajakan dengan mempertahankan *awareness* akan situasi keamanan maritim dan melanjutkan hubungan dekat dengan aktor *counter-piracy* internasional lainnya. NATO juga mempertahankan upaya *counter-piracy* di laut dan darat dengan mendukung negara-negara di kawasan itu untuk membangun kapasitas (*capacity building*) dalam memerangi pembajakan dengan usaha mereka sendiri.⁵²

Anggota Operation Ocean Shield

Bersama dengan kekuatan angkatan laut internasional lainnya, misi NATO lewat *Operation Ocean Shield* telah mencapai beberapa keberhasilan awal dalam mengurangi perompakan di wilayah Tanduk Afrika. Beberapa anggota NATO yang berpartisipasi dalam operasi ini antara lain Kanada, Denmark, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara di luar NATO yang berpartisipasi di dalamnya yakni termasuk Australia, Kolombia, Jepang, Selandia Baru, dan Ukraina.⁵³

Hanya dua di antaranya yang terintegrasi dalam Standing NATO Maritime Group untuk penempatan secara langsung dalam operasi yaitu Selandia Baru dan Ukraina. Selain itu, unit NATO bekerja sama dengan operasi internasional lainnya yang terjadi pada waktu yang sama seperti *European Union* (EU) dengan *Operation Atalanta* dan Amerika Serikat yang memimpin Task Force 151. Dua negara yang disebutkan terakhir menyediakan kapal bagi *Standing NATO Maritime Group* (SNMG) untuk ditempatkan di wilayah patroli. Dari Juni hingga Desember 2013, Ukraina menyediakan kapal fregat *UPS Hetman*

Sagaidachny ke SNMG1 sedangkan Selandia Baru menyediakan kapal fregat *HMNZS Te Mana* ke SNMG2 dari Januari hingga Juni 2014.⁵⁴

Peran Operation Ocean Shield

Tingginya tingkat aktivitas pembajakan di Teluk Aden, lepas pantai Tanduk Afrika, dan di Samudra Hindia merusak upaya kemanusiaan komunitas internasional di Afrika dan keselamatan salah satu rute maritim tersibuk dan terpenting di dunia—pintu gerbang masuk dan keluar dari Terusan Suez untuk waktu yang lama. Antara 2008 hingga 2016, NATO membantu mencegah dan mengganggu serangan bajak laut, sekaligus melindungi kapal dan membantu meningkatkan tingkat keamanan secara umum di kawasan itu melalui berbagai operasi militer.

Operation Ocean Shield muncul sebagai bagian dari tanggapan dunia internasional terhadap kegiatan perompakan yang mengarah pada “industri” pembajakan yang disertai tebusan yang berkembang dalam kekacauan perang saudara yang panjang di Somalia, dan yang, pada puncaknya, merugikan industri pelayaran global sekitar USD 7 miliar per tahun, dan sejumlah pelaut malang yang merengas nyawa. Selain itu, dalam jangka waktu yang lama aktivitas perompak tersebut juga mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan ke Somalia, dan mengancam jalur komunikasi laut vital atau *sea lines of communication* (SLOC) dan kepentingan ekonomi di lepas pantai Tanduk Afrika, Teluk Aden, dan Samudra Hindia.⁵⁵

Mekanisme Operation Ocean Shield

Operasi *counter-piracy* di kawasan ini tidak hanya sebatas melakukan patroli, namun kapal NATO juga melakukan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk memverifikasi aktivitas pengiriman di lepas pantai Somalia lalu memisahkan lalu lintas maritim yang sah dari kapal perompak yang dicurigai. Kapal-kapal komersial yang sedang transit di daerah itu dipantau dan dalam banyak kasus dikawal untuk memastikan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ NATO, Counter-piracy operations (2008-2016), *nato.int*, diakses dari https://www.nato.int/cps/en/-/natohq/topics_48815.htm pada 25 September 2022

⁵² Ibid.

⁵³ NATO, Counter-Piracy Operations, loc.cit.

perjalanan mereka agar aman. Industri pelayaran secara teratur berhubungan dengan NATO dan operasi *counter-piracy* lainnya melalui NATO *Shipping Centre* di mana aktivitas bajak laut dapat dilaporkan dan dibagikan untuk mencegah serangan dan meningkatkan kesadaran situasional terhadap lingkungan maritim. Selain itu, kapal-kapal NATO juga secara aktif mengejar kapal-kapal yang dicurigai sebagai perompak untuk mencegah mereka melakukan serangan.⁵⁶

NATO *boarding teams* dapat menaiki kapal yang dicurigai untuk menentukan apakah ada perompak di dalamnya. Kapal NATO juga bisa menggunakan kekuatan untuk menghentikan kapal bajak laut atau campur tangan dalam pembajakan. Setiap perompak yang ditahan segera dipindahkan ke lembaga penegak hukum nasional yang ditunjuk. Selain itu, NATO bersama dengan mitranya bekerja sama dengan komunitas maritim untuk memastikan bahwa baik kapal dagang maupun awak kapal mengetahui Praktik Manajemen Terbaik atau *Best Management Practices 4* (BMP 4) yang memberikan saran tentang cara melindungi kapal dari serangan bajak laut.⁵⁷

Mandat Hukum dan Regional Capacity Building

Operation Ocean Shield sepenuhnya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan perompakan yang berbasis di Somalia. Resolusi DK PBB 2184 (November 2014) memperbaharui seruan kepada negara-negara bagian dan organisasi kawasan untuk mengambil bagian serta aktif dalam perang melawan pembajakan di lepas pantai Somalia. Dengan persetujuan dari pihak berwenang Somalia, resolusi tersebut juga mengamanatkan anggotanya untuk melakukan segala cara yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata di dalam wilayah perairan Somalia.⁵⁸

⁵⁶ NATO Allied Maritime Command, loc.cit.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ NATO, Operation Ocean Shield November 2014 Fact Sheet, diakses dari https://www.nato.int/nato-static/fl2014/assets/pdf/pdf_topics/141202a-Factsheet-OceanShield-en.pdf, pada 24 Juli 2022.

Sedangkan *Regional Capacity Building* merupakan elemen penting untuk membawa keamanan maritim ke kawasan dan untuk mentransfer upaya *counter-piracy* dari Komunitas Internasional ke Somalia dan negara-negara di kawasan tersebut. Dalam sarana dan kemampuan, dan berfokus pada area yang memberikan nilai tambah, upaya peningkatan kapasitas NATO bertujuan untuk membantu negara-negara kawasan dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk memerangi kegiatan pembajakan. Program peningkatan kapasitas meliputi pelatihan, kursus pendidikan, partisipasi dalam latihan militer, dan saran tentang reformasi sektor keamanan dengan tujuan meningkatkan stabilitas regional dengan memperkuat kemampuan mitra untuk bertahan melawan ancaman eksternal.⁵⁹

Perkembangan Operation Ocean Shield

Perubahan besar pertama *Operation Ocean Shield* adalah menggeser perannya yang semula membantu kapal yang menjadi korban perompakan dan menyediakan pengawalan menjadi menargetkan logistik dan dukungan untuk para perompak. Pasukan NATO diizinkan penggunaannya untuk melumpuhkan ataupun menghancurkan kapal yang dicurigai sebagai perompak atau perampok kapal bersenjata setelah upaya pelacakan dengan cara memasang suar pelacak ke kapal induk perompak yang berhasil ditangkap dilakukan.⁶⁰

NATO mengarahkan operasi ini untuk berkonsentrasi pada upaya *counter-piracy* di lautan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dan kesuksesan operasi ini dalam mengurangi jumlah perompakan di kawasan perairan Tanduk Afrika. Berkat upaya pelacakan kapal perompak, pasukan gabungan yang bertugas dalam misi *counter-piracy* dapat memprediksi dan mencegah serangan perompak dengan mudah dan efektif. Hal ini sangat mempengaruhi aktivitas para perompak sehingga serangan terhadap kapal dagang mengalami penurunan yang signifikan.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ NATO, Counter-Piracy Operations, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm, pada 21 Juli 2022.

Faktor-Faktor Penunjang Keberhasilan Operation Ocean Shield

Operation Ocean Shield merupakan salah satu misi counter-piracy yang dianggap sukses di perairan Tanduk Afrika. Dengan operasi counter-piracy lainnya, operasi ini memainkan peran vital ditandai dengan menurunnya angka perompakan di kawasan ini. Terhitung sejak tahun 2012, tidak ada kapal atau awak kapal yang menjadi korban perompakan oleh perompak Somalia dan tidak ada insiden perompakan besar yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu empat tahun hingga operasi ini diakhiri.⁶¹

Pada tahun 2010 yang merupakan puncak pembajakan di kawasan tersebut dimana NATO mencatat terjadi 45 kasus pembajakan dan 132 tindakan percobaan pembajakan, namun akhirnya tidak berhasil akibat adanya intervensi militer internasional yang dilakukan oleh NATO sehingga 147 total kasus 'gangguan' tersebut gagal dan memaksa perompak untuk mengurungkan niat dan tindakan mereka. Pada saat Angkatan Udara Kerajaan Denmark menerbangkan pesawat Challenger CL-604 pada misi pengawasan terakhir yang diberi lencana NATO, jumlah kasus pembajakan tersebut bahkan telah turun menjadi nol kasus dan banyak perompak telah ditahan dan dituntut oleh otoritas nasional.⁶²

Salah satu kunci keberhasilan operasi ini adalah karena adanya faktor sinergitas yang dilakukan NATO lewat kolaborasi dengan pihak lain. Operasi gabungan ini bekerja untuk pertama kalinya secara erat tidak hanya dengan Uni Eropa dan angkatan laut Rusia, Cina dan Jepang, melainkan juga sektor swasta. Selain itu, *Operation Ocean Shields* mengingatkan kita bahwa NATO pada dasarnya adalah

⁶¹ Christian Bueger, NATO's fight against Somali pirates: the end of an unsung success story, *piracy-study.org*, diakses dari <https://piracy-studies.org/natos-fight-against-somali-pirates-the-end-of-an-unsung-success-story/> pada 25 September 2022.

⁶² Gareth Evans, Operation Ocean Shield: mission success?, *naval-technology.com*, diakses dari <https://www.naval-technology.com/analysis/featureoperation-ocean-shield-mission-success-5776043/> pada 25 September 2022.

organisasi keamanan maritim yang mana hal ini merupakan mekanisme tak ternilai yang siap untuk menanggapi setiap krisis keamanan yang terjadi di laut. Menurut Christian Bueger, terdapat tiga faktor utama yang menjadi kesuksesan operasi ini yaitu kesiapan dan kesigapan operasi counter-piracy, kerjasama dalam melawan perompak, dan bekerja dengan sektor swasta.⁶³

Misi Counter-piracy Pasca Operation Ocean Shield

Patroli yang dilakukan oleh pasukan angkatan laut terlepas itu dari operasi apapun telah memberi komunitas pelayaran internasional kerangka keamanan strategis yang menawarkan segalanya, mulai dari jaringan intelijen hingga polisi yang setara marinir yang siap pakai. Meskipun ini merupakan bagian penting dalam memerangi potensi ancaman dari pembajakan, markas komando maritim NATO menjelaskan bahwa seperti halnya semua kejahatan, pemilik individu dari aset bernilai tinggi juga perlu mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi mereka sendiri. Penggunaan penjaga bersenjata di atas kapal dan berbagai tindakan pertahanan lainnya yang diuraikan dalam BMP 4, ditambah dengan memanfaatkan sepenuhnya layanan yang ditawarkan oleh organisasi keamanan maritim Inggris dan Uni Eropa, harus dipandang sebagai hal yang wajar.

Tanpa hal-hal tersebut, ada risiko para perompak sekali lagi akan melakukan kembali aktivitas penculikan dan meminta tebusan dari *comersial shipping* karena dianggap sebagai jalan pintas yang mudah dalam mendapatkan uang. Sementara itu, komunitas internasional harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menjaga Somalia terus berkembang menjadi negara bangsa yang bertanggung jawab dan berfungsi.

Masalah pembajakan di kawasan perairan Tanduk Afrika telah menyebabkan evaluasi ulang mendasar tentang pentingnya keamanan maritim untuk benua Afrika sehingga ada konsensus internasional yang

⁶³ Christian Bueger, "Learning from piracy: future challenges of maritime security governance," *Global Affairs* 2015, Vol. 1, No. 1: hlm. 39–40, <http://dx.doi.org/10.1080/23340460.2015.960170>.

kuat untuk bertindak dan mendukung aktor regional untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di kawasan tersebut. Dalam hal ini, pembajakan telah membuka jendela peluang untuk menata kembali tata kelola keamanan maritim dan membangun institusi yang lebih berkelanjutan. Menjadi sangat penting bagi masyarakat internasional secara umum dan masyarakat di kawasan Tanduk Afrika secara khusus untuk mulai belajar dari pembajakan; bahwa negara-negara perlu merestrukturisasi sektor maritim mereka dan sumber daya yang cukup tersedia untuk melaksanakan program-program yang mengatasi ancaman keamanan maritim. Yang diperlukan tidak lain adalah reformasi fundamental sektor keamanan maritim di tingkat nasional dan regional dengan berefleksi dari pengalaman-pengalaman di atas.

Menjadikan masalah keamanan maritim sebagai sesuatu yang *mainstream* di seluruh kebijakan donor internasional akan sangat dibutuhkan. Jika ketidakamanan maritim melahirkan ancaman, maka tujuan jangka panjangnya adalah bekerja menuju de-sekuritisasi maritim dan membangun komunitas keamanan maritim regional. Hal ini pada akhirnya mungkin menjadi paradoks inti dari strategi saat ini: untuk mencapai de-sekuritisasi laut dalam jangka panjang, yang pertama diperlukan adalah sekuritisasi, yaitu pengakuan atas dampak serius yang ditimbulkan oleh ketidakamanan maritim seperti ancaman terhadap ekonomi, mata pencaharian, dan kepentingan keamanan nasional dan internasional.

SIMPULAN

Operation Ocean Shield dapat dianggap sebagai tonggak bagi koalisi atau gabungan operasi maritim lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana aliansi dapat berkontribusi pada koalisi internasional, bagaimana aliansi tersebut dapat memajukan tujuannya melalui mekanisme informal, dan bagaimana aliansi tersebut dapat berkolaborasi lebih baik dengan industri (*shipping industry*). Pelajaran-pelajaran ini tidak hanya penting di bidang keamanan yang sedang berkembang, seperti keamanan siber, tetapi juga dalam operasi yang lebih konvensional yang membutuhkan kolaborasi

militer di luar anggota aliansi langsung. Keberhasilan dalam mengalahkan dan mencegah pembajakan juga memberi kita pengingat optimis bahwa aliansi ini tidak hanya pencegah, tetapi juga salah satu landasan arsitektur keamanan bersama global, utamanya keamanan maritim internasional.

Dibutuhkan pendekatan keamanan maritim yang luas untuk menghadapi ancaman pembajakan di wilayah tersebut. Ini sangat penting mengingat betapa pentingnya Teluk Aden dan perairan sekitarnya (kawasan perairan Tanduk Afrika) bagi perdagangan global, dengan ribuan kapal melintasinya setiap tahun menuju dan dari Terusan Suez di Mesir. Perang di Yaman dan perselisihan geopolitik yang melibatkan beberapa negara juga memperumit gambaran keamanan maritim di wilayah tersebut. Tetapi pendekatan keselamatan yang komprehensif hanya akan berhasil jika Somalia sepenuhnya stabil dan dengan pemerintahan yang kuat yang dapat menangani masalah lepas pantai di darat. Pembajakan hanyalah satu masalah dalam jaringan kompleks yang memengaruhi keamanan maritim. Jika situasi politik dan pemerintahan negara-negara di kawasan Tanduk Afrika stabil, maka keamanan maritim akan lebih aman dengan ditandai tumbuhnya ekonomi biru masyarakat pesisir Tanduk Afrika.

DAFTAR PUSTAKA

- Kelleman, M. G. (2011). "Somali Piracy: Causes and Consequences." *Inquiries Journal/Student Pulse* Vol.3. No 9, (July 2011)
- Riana Ary M dan Nugraha Sudirman(2016)“Maritime Diplomacy sebagai strategi pembangunan keamanan maritime Inonesia”*Jurnal Wacana Politik*” Vol. 1, No. 2, (Oktober 2016) 175-182
- Keliat,Makmur (2009)” Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 1,(Juli,2009).
- Karawita Amali (2019) “Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the International Community” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 23, Issue 2, November,2019

Miwa Hirono dan Manshu Xu, "China's Military Operations Other than War," *The RUSI Journal* 158, no. 6 (December 24, 2013) 77

Carmen Gebhard dan Simon J Smith, "The two faces of EU-NATO cooperation: Counter-piracy operations off the Somali coast," *Cooperation and Conflict* 2015, Vol. 50. (Maret 2015) 108

Christian Bueger, "Learning from piracy: future challenges of maritime security governance," *Global Affairs* 2015, Vol. 1, No. 1 (April 2015) 39-45

Isaac Kfir, NATO's Paradigm Shift: Searching for a Traditional Security-Human Security Nexus, *Contemporary Security Policy* 36, no. 2 (July 8, 2015): 235

Bernard Wiśniewski dan Szymon Siódmak, "Problems of sea route planning for a ship operating in piracy-threatened areas: the Indian Ocean", *Scientific Journals* Vol.26 No.98, (Maret 2011)115.

Mohtar Mas'ood., *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 2013.

Dr Clive Archer, *International Organization: Third Edition*, London 2001.

Barry Buzan, Olly Weaver, Jaap de Wilde, *Security: A new Framework for Analysis*, London, 1998.

Fantaye Demesie, *Regional Approaches to Maritime Security in The Horn of Africa*, Addis Ababa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Addis Ababa Office, 2014.

Muli D *Djibouti code of conduct : an instrument to suppress piracy in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden*, Disertasi World Maritime University, Malmö, 2011

The World Bank Regional Vice-Presidency for Africa, *The Pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation*, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2013.

Mangistaeb Kidane, *critical factor in The Horn of Africa Raging Conflict* Upsalla, The Nordik African Institute, 2011

Neil Melvin, *The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region*, Stockholm: SIPRI, 2019

James M. Bridger, "Safe Seas at What Price the Costs Benefits and Future of NATO's

Operation Ocean Shield," *NATO Research Paper* No. 95 (September 2013).

Harkavy, R. H., SIPRI, *Bases Abroad: The Global Foreign Military Presence* (Oxford University Press: Oxford, 1989), hlm. 7-8.

Elwaleed Ahmed Talha, *Political and Economic Impact of Somalia Piracy* hal 7